

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Teori

Green theory memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kebijakan transisi energi Jerman yang sesuai dengan UNFCCC. Adanya penekanan tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan dan penggunaan energi. Dalam konteks Jerman, teori ini mendukung upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mengembangkan kebijakan transisi energi yang berkelanjutan dan sesuai dengan UNFCCC di Jerman. Dalam mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan partisipasi publik, teori ini membantu memastikan bahwa kebijakan transisi energi tidak hanya efektif dalam mengurangi emisi dan dampak lingkungan, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jerman.

2.1.1 Konsep Green Theory

Pada tahun sekitar 1960-an, ada teori yang menyatakan bahwa manusia mementingkan diri sendiri dan mengeksploitasi sumber daya bersama seperti tanah, air tawar, dan ikan, diakui secara luas sebagai penyebab krisis lingkungan dunia. Konferensi PBB pertama tentang topik ini berlangsung pada tahun 1970-an, dan pada tahun 1980-an, partai-partai politik hijau dan kebijakan publik mulai meningkat. Pada saat yang sama, teori hijau diperlukan untuk membantu menjelaskan dan memahami kesulitan-kesulitan politik ini.¹ Terutama dengan semakin banyaknya bukti bahwa tindakan manusia secara signifikan mengubah planet kita, hubungan internasional pada tahun 1990-an mulai mengakui lingkungan alam sebagai sumber pertanyaan yang semakin signifikan bagi disiplin ilmu ini. Protokol Kyoto dari UNFCCC, sebuah perjanjian garis besar, tidak efektif dalam mengatasi perubahan iklim pada bulan Desember 2015, Kesepakatan Paris menandai realisasi akhir dari tujuan ini. Terlepas dari apakah upaya ini akan benar-benar berhasil atau tidak Meskipun penyebab dan dampak perubahan iklim belum diketahui, teori hijau menyiratkan bahwa

¹ Dyer Hugh, *Introducing Green Theory in International Relations*. E-International Relations.07 Januari 2018. Diakses dari : <https://www.e-ir.info/2018/01/07/green-theory-in-international-relations/>

fokus pada manusia keyakinan dan keputusan masyarakat lebih baik daripada konsentrasi pada tawar-menawar.²

Dalam hubungan internasional, Green Theory membahas bagaimana isu-isu lingkungan mempengaruhi dinamika politik dan hubungan antar negara. Teori ini berpendapat bahwa masalah lingkungan tidak bisa diabaikan dan harus menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan luar negeri. Green Theory menekankan perlunya kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan global, termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Green Theory juga melibatkan aspek etika dan nilai-nilai lingkungan. Pendekatan ini mempertimbangkan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya serta pentingnya memperlakukan alam dengan hormat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Green Theory juga mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan dan penekanan pada kesetaraan sosial dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan.³

Konsep Green Theory melibatkan analisis terhadap factor – faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Konsep ini juga menganjurkan penerapan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat global. Sehingga tujuan dari konsep Green Theory ini sendiri sebagai suatu upaya untuk memahami dan memecahkan masalah lingkungan dengan pendekatan yang holistik, menggabungkan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan etika. Tujuan utamanya adalah mencapai keberlanjutan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kemampuan alam untuk menyediakan sumber daya.

Pada 1990-an, Hubungan Internasional mengakui lingkungan alam sebagai sumber penelitian yang semakin penting dalam disiplin ini, yang membutuhkan perhatian teoritis dan praktis. Terutama setelah semakin banyak bukti bahwa perilaku manusia secara signifikan mengubah iklim dan presentasi global kita masalah keselamatan dan lingkungan. Teori hijau memandang arah ini dalam kaitannya dengan politik nilai dan agensi. Politik hijau, yang memiliki

² Ibid. hal 4

³ Jackson, R. and Sorensen, G., 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press, pp.322-323.

pandangan yang lebih inklusif tentang politik daripada teori-teori yang lebih umum atau banyak orang yang terlibat dalam studi akademis tentang politik.

Akibatnya, banyak peneliti yang menemukan dalam politik hijau pemahaman yang terlalu luas tentang ruang lingkup politik hijau yang secara efektif mencakup semua hal yang dilakukan seseorang, mulai dari pilihan konsumsi, transportasi, limbah, kesuburan, dan isu-isu lainnya. Hal-hal tersebut sering digambarkan dalam istilah yang sangat umum sehingga dapat dianggap sebagai "pra-politik" atau terlalu besar, mendesak, dan signifikan untuk "politik" dan keterlibatan politik.

Teori hijau milik tradisi teori kritis dalam arti bahwa masalah lingkungan menimbulkan pertanyaan tentang hubungan kita dengan orang lain dalam konteks komunitas dan pengambilan keputusan kolektif. Ini berulang kali menimbulkan pertanyaan di mana letak batas-batas komunitas politik. Dalam kasus masalah lingkungan transnasional, masalah ini merupakan masalah tingkat politik yang harus dicari solusinya. Teori hijau tampaknya mengkritik pandangan liberal, dan melihat masalah nyata selama Perang Dingin yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Sehingga Jerman berupaya upaya untuk mengelola krisis dengan: Krisis ekologi adalah masalah global dalam komunitas global.⁴

Bagi ahli teori hijau, jawabannya terletak pada konsep alternatif asosiasi politik berdasarkan hubungan ekologis kita. Tantangan praktis yang jelas dari perubahan lingkungan belum mengubah teori IR atau bahkan banyak praktik. Prevalensi berkelanjutan dari hubungan negara yang kompetitif tidak kondusif untuk kerja sama lingkungan atau mendorong pemikiran hijau. Namun, telah ada perkembangan teoritis dan beberapa kemajuan praktis dan literatur yang luas telah muncul yang melihat berbagai masalah lingkungan dari perspektif teoritis yang berbeda. Jika ini tidak sama dengan satu visi yang jelas, itu pasti merupakan pandangan jangka panjang tentang masa depan umat manusia.⁵

Masalah lingkungan global membutuhkan solusi global. Ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang global sebagai prinsip pengorganisasian alternatif. Mungkin kita harus melihat gerakan sosial hijau daripada negara untuk wawasan teoritis.⁶ Perubahan iklim adalah masalah

⁴ Paterson, M., Doran, P., & Barry, J. (2006). *Green Theory. The State, chapter 135–154.*

⁵ Ibid. 135–154

⁶ Mc.Glinchey, Stephen. Rosie Walters. dan Christian Scheinflug (2017). *Internasional Relations Theory.* Bristol. England. E- International Relations Publishing. hal 84 – 85

lingkungan utama di zaman kita, yang disebabkan oleh ketergantungan kita yang berbahaya pada bahan bakar fosil. Teori hijau membantu kita memahami hal ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai ekologi jangka panjang daripada keuntungan manusia jangka pendek. Tidak ada solusi teknis yang mudah untuk perubahan iklim buatan manusia.

Dari perspektif teori hijau, kebuntuan teknologi ini membutuhkan perubahan nilai dan perilaku manusia, sehingga menawarkan peluang untuk inovasi politik bahkan transformasi tatanan dunia. Politik teori IR dapat menjelaskan mengapa perubahan iklim menjadi masalah yang sulit bagi negara karena ada persaingan ekonomi dan tidak ada insentif untuk bekerja sama. Namun, saya tidak dapat memberikan kerangka kerja alternatif untuk menjelaskan bagaimana menangani hal ini. IR tetap terlalu fokus pada negara dan kepentingan nasionalnya daripada aktor lain yang berpotensi lebih mendukung seperti kota dan komunitas, LSM, dan gerakan sosial hijau.⁷

Perspektif teori hijau tentang perubahan iklim secara langsung memahami konsekuensi dari pilihan manusia secara kolektif. Secara khusus, pilihan pada ini telah mengarah pada praktik ekonomi historis yang berpusat pada manusia oleh kelompok politik (negara) yang secara historis sewenang-wenang yang telah mengeksploitasi alam untuk keuntungan jangka pendek mereka sendiri. Perubahan iklim adalah contoh nyata dari ketidaktanggungjawaban manusia saat ini dan di masa depan sebagai penyebab dan ketidakadilan bagi seluruh ekosistem. Oleh karena itu, solusi membutuhkan teori nilai ekosentris dan sikap etis, bukan instrumental, terhadap hubungan manusia ditanah masa depan bersama. Teori hijau membantu mendefinisikan kembali isu-isu seperti perubahan iklim dalam hal nilai ekologis jangka panjang daripada keuntungan politik jangka pendek. Secara umum, ada dua hal yang jelas dari hal ini.

Pertama, kaum Hijau menolak pernyataan bahwa pengetahuan itu "netral", yang biasanya didasarkan pada argumen konsekuensial bahwa kita harus memberikan kebebasan kepada para ilmuwan untuk mengejar pencarian intelektual mereka karena kita tidak dapat meramalkan sebelumnya konsekuensi apa yang akan muncul dari penemuan pengetahuan tertentu. Kedua, menurut pandangan kaum Hijau, masih ada tujuan implisit yang terlibat dalam penciptaan pengetahuan bahkan ketika hal itu didasarkan pada pembagian (etis) manusia dari alam, dengan manusia diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri dan "alam" diturunkan menjadi alat untuk

⁷ Ibid. hal 86

mencapai tujuan tersebut. Karena secara etis gagal menghasilkan sistem dan karena secara luas dipegang oleh kaum Hijau bahwa rasionalitas instrumental-klaim pengetahuan yang ditentukan oleh kekuasaan-mendasari degradasi ekologis.⁸

Menurut Partai Hijau Jerman, masalah utama dalam kesehatan dan perawatan kesehatan termasuk polusi dan sistem kesehatan Jerman yang lebih mengutamakan penyembuhan dan keuangan. Akan tetapi, berbagai program dapat memberikan penekanan yang berbeda pada masalah-masalah ini. Bundesprogramm tahun 1980 menguraikan gagasan "pengobatan ekologis" (ökologische Medizin), yang menyarankan berbagai langkah untuk memerangi polusi dan mempromosikan promosi kesehatan dan perawatan pencegahan, dan memeriksa masalah lingkungan masyarakat industri dengan sangat rinci. Agenda pemilihan umum tahun 1998 dimulai dengan polusi sebelum memfokuskan diri pada isu-isu yang berkaitan dengan struktur asuransi kesehatan wajib Jerman (SHI), yang telah mendominasi kebijakan kesehatan Jerman sejak tahun 1977.⁹

2.1.2 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik di kemudian hari dengan jangka waktu yang lama. Kepentingan nasional menyangkut kepada kebijakan – kebijakan negara serta rencana – rencana yang mau dituju. Yang akibatnya kepentingan nasional sebuah negara dapat menjadi sebuah polemic bahkan dipakai untuk justifikasi bagi tindakan sebuah negara.¹⁰

⁸ Hay, C., Lister, M., & Marsh, D. (Eds.). (2006). *The State Theories and Issues*. Palgrave Macmillan. 175 Fifth Avenue, New York. Hal 136 – 154

⁹Wörz, M., & Wismar, M. (2001). *Green Politics in Germany: What is Green Health Care Policy? International Journal of Health Services*, 31(4), 847–867

¹⁰ Soeprapto.R.(1997).*Hubungan Internasional Sistem, Interaksi dan Perilaku*.Raja Grafindo Persada.Jakarta,hal 143 - 150

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, antara lain : Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya, Kedua, perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, Ketiga, perlindungan terhadap budayanya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.

Kepentingan nasional suatu negara ialah hasil yang dibuat oleh para pengambil kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa. Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.¹¹

Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (prosperity), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan¹²

¹¹Binus University. IR Thinkers. *Hans Morgenthau dan Political Realism* <https://ir.binus.ac.id/2012/07/27/hans-morgenthau-dan-political-realism/>

¹² Kepentingan Nasional, diakses dari [:https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1902/8/UNIKOM_Senno%20Ariga%20Trahastadie_Bab%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1902/8/UNIKOM_Senno%20Ariga%20Trahastadie_Bab%20II.pdf)

Kepentingan nasional Jerman dalam keamanan energi untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam konteks transisi energi, Jerman berupaya mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor, terutama bahan bakar fosil, dan beralih ke sumber energi terbarukan yang dapat dihasilkan secara domestik. Dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri, Jerman dapat meningkatkan keamanan energinya. Selain itu, transisi energi merupakan kepentingan nasional Jerman dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. Jerman telah mengembangkan industri energi terbarukan yang kuat, seperti energi angin dan surya, yang memberikan peluang lapangan kerja dan kontribusi ekonomi yang signifikan. Dengan mengadopsi kebijakan transisi energi yang sesuai dengan UNFCCC, Jerman dapat terus memperkuat industri energi terbarukan dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam sektor ini, menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rangka memerangi perubahan iklim.

Melalui kebijakan transisi energi yang sesuai dengan UNFCCC, Jerman berusaha untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, Jerman dapat memenuhi komitmennya dalam kesepakatan internasional dan menjaga reputasinya sebagai pemimpin global dalam mitigasi perubahan iklim. Infrastruktur, metode transportasi, dan prosedur operasional terkait di Jerman akan terpengaruh oleh perubahan iklim dengan cara yang unik dan berbeda-beda. Karena pentingnya transportasi bagi perekonomian Jerman, dampak perubahan iklim dapat mengganggu sektor ini secara serius, contoh faktor lingkungan yang berdampak pada beragam sarana transportasi antara lain gelombang panas, cuaca beku, kekeringan, badai, kenaikan permukaan laut, dan ketinggian air sungai. Penilaian risiko nasional memperkirakan bahwa kerusakan akibat panas akan meningkat, meskipun bervariasi menurut wilayah, dan kerusakan akibat embun beku tidak terlalu mengancam transportasi dalam waktu dekat. Wilayah spasial yang terkena dampak banjir sungai dan banjir bandang akan terus bertambah dalam waktu dekat dengan pergeseran yang signifikan.¹³

2.1.3 Organisasi Internasional

¹³Climate ADAPT. *Economic and Infrastructure Situation*.16 April 2021. Diakses dari http://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/das_gesamt_bf.pdf

Organisasi internasional adalah entitas yang terdiri dari negara-negara anggota yang bekerja sama dalam kerangka hukum internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang. Mereka berperan dalam memfasilitasi kerjasama, dialog, negosiasi, dan koordinasi antara negara-negara dalam isu-isu global. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam hubungan internasional dengan tujuan mempromosikan perdamaian, keamanan, keberlanjutan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama, diplomasi, negosiasi, dan koordinasi antara negara-negara dalam mengatasi isu-isu global yang kompleks.

Mereka berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, serta mempromosikan kepentingan bersama dan solusi kolaboratif terhadap masalah bersama. Organisasi internasional juga memfasilitasi pembuatan dan implementasi perjanjian internasional, mengawasi kepatuhan terhadap norma-norma internasional, dan menyediakan platform untuk mempromosikan dialog antara negara-negara dengan pandangan dan kepentingan yang berbeda. Organisasi internasional mengacu pada kerjasama antara negara-negara dalam bentuk entitas atau badan hukum yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang di tingkat global.

Organisasi internasional didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan kerjasama antar-negara untuk mengatasi isu-isu global yang memerlukan solusi kolaboratif. Pendekatan rasionalis dalam mempelajari rezim internasional merupakan upaya untuk menggunakan beberapa ide dan metode dari ilmu ekonomi untuk meneliti IO. Pendekatan ini memandang pemerintah sebagai entitas kesatuan yang rasional yang ingin memaksimalkan nilai mereka sendiri, sama seperti yang dilakukan oleh sebagian besar ekonom terhadap individu. Dalam penggunaan ini, istilah "kesatuan" mengacu pada negara yang memiliki Alih-alih menjadi kumpulan kepentingan yang berbeda, negara dan satu suara yang jelas pengambil keputusan di tingkat individu dan kelompok kepentingan domestik.

Negara mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai pilihan perilaku dengan cara yang rasional dan memaksimalkan utilitas. Negara harus terbuka kepada mereka dan mendasarkan keputusan pada apa yang paling memajukan kepentingan mereka.¹⁴ Prasyarat tradisional untuk

¹⁴ Barkin Samuel J. *International Organization: Theories and Institutions*. 2006. PALGRAVE MACMILLAN™ 175 Fifth Avenue, New York, N.Y hal 2 – 13

dominasi dalam hubungan internasional, yaitu kekuatan militer, tidak ada dalam lembaga internasional. Namun, beberapa IO juga memiliki beberapa otoritas kepolisian dan hukum. Mereka dapat, misalnya, menggunakan metode yang tidak memihak untuk memeriksa apakah negara mematuhi hukum internasional, meskipun hal ini Mereka lebih sering bergantung pada negara untuk mendapatkan informasi ini.¹⁵

Melalui organisasi internasional, negara-negara dapat bekerja sama dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, kemiskinan, penyakit menular, migrasi, dan isu-isu lainnya yang melintasi batas negara. Organisasi internasional juga memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan memperluas jaringan kerjasama di tingkat global. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam hubungan internasional dengan tujuan mempromosikan kerjasama, stabilitas, dan keberlanjutan global. Mereka membantu memfasilitasi implementasi kebijakan transisi energi Jerman sesuai dengan UNFCCC dengan melibatkan negara-negara anggota dalam kerjasama, koordinasi, dan dukungan dalam upaya bersama mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan perlindungan iklim. Negara-negara dapat bekerja sama untuk meminimalkan pemanasan global melalui penanganan perubahan iklim.

Negara-negara bekerja sama melalui organisasi internasional sebagai forum untuk membantu mengatasi tantangan perubahan iklim demi mencapai perdamaian. UNFCCC atau yang dikenal juga dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim merupakan organisasi internasional yang berfokus pada perubahan iklim sebagai salah satu jawaban dari permasalahan yang disebabkan oleh perubahan iklim.¹⁶

Perubahan iklim merupakan salah satu jawaban atas kesulitan yang disebabkan oleh perubahan iklim saat ini masalah. Norma-norma yang jelas dan mengikat secara hukum harus ditetapkan untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi setiap negara anggota UNFCCC. Sebagai anggota UNFCCC, peraturan yang jelas dan mengikat harus ditetapkan.¹⁷

¹⁵ Ibid. hal 20 -24

¹⁶ Puspitarini, Batan, Bramastya, et al, Sospoli. *Peran Organisasi Internasional dalam Atasi Perubahan Iklim dalam UNFCCC*. Januari 2022. Hal 38 - 42

¹⁷ Ibid. 38 - 42

2.2 Review Literatur

Transisi Energi di Jerman yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat dalam energi dan infrastruktur terbarukan. Pengembangan energi terbarukan yang lebih ambisius diperlukan untuk mengurangi dampak yang dilakukan manusia pada sistem iklim. Peningkatan energi terbarukan mengarah pada aspek konservasi terutama dampak pada alam, spesies dan habitat makhluk hidup. Oleh karena itu, sistem energi terbarukan memiliki implikasi bagi konservasi keanekaragaman hayati. Untuk mencapai tujuan keamanan energi, efisiensi ekonomi dan kebijakan perlindungan iklim, struktur pasokan energi yang saat ini harus direstrukturisasi secara mendasar dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Karena memiliki potensi yang besar untuk inovasi dan transformasi yang akan membuka kunci pada pertumbuhan dan pekerjaan sistem energi.¹⁸

Beberapa literatur yang penulis review antara lain adalah kajian yang ditulis oleh Akbar Averroes Sabil (2018) yang berjudul “Kepentingan Jerman Dalam Kerjasama Weimar Triangle Terkait Energi Terbarukan Periode 2012 - 2015”, menjelaskan terkait kepentingan Jerman dalam kerjasama energi Weimar Triangle. Yang dimana kerjasama ini menghendaki adanya suatu penanganan energi terbarukan. Masalah energi sendiri memiliki berbagai permasalahan diantaranya mengenai kebijakan setiap negara. Terjadi nya kesenjangan antara Jerman sebagai negara dengan penanganan energi yang lebih maju dari Perancis dan Polandia menjadi permasalahan dalam kerjasama ini. Kondisi yang tidak siap dialami kedua negara ini mengakibatkan Jerman harus memikirkan langkahnya dalam kerjasama ini. Selain kepentingan energi terdapat juga kepentingan lingkungan dimana motif ekonomi dalam kerjasama tersebut terdapat investasi dan pendanaan terkait energi terbarukan.

Dalam kepentingan nasional, Jerman juga memiliki kaitan dengan kepentingan tata internasional dimana hal tersebut berkaitan dengan bagaimana sistem Eropa yang memiliki penanganan terkait energi terbarukan. Terkait kepentingan keamanan, energi membuat Jerman menjadi benar - benar tetap bekerjasama dalam rangka kerjasama Weimar Triangle.¹⁹Selanjut nya,

¹⁸ DW Indonesia. *Jerman Percepat Transisi Energi Terbarukan*.07 April 2022 diakses dari <https://www.dw.com/id/jerman-percepat-transisi-energi-terbarukan/a-61392710>

¹⁹ Sabil Akbar Averroes. Universitas Islam Negeri Syariff Hidayatullah Jakarta. *Kepentingan Jerman Dalam Kerjasama Weimar Triangle Terkait Energi Terbarukan Periode 2012 – 2015*. Skripsi. 2018

Geybi Giandwinuary (2015). yang berjudul “Kerjasama Indonesia dan Jerman Dalam Pengembangan Energi Panas Bumi (Geothermal) 2010 - 2012 yang mengemukakan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Jerman terkait perluasan energi panas bumi di Indonesia dimulai pada tahun 2010 hingga 2012 telah dilaksanakan secara optimal.

Dapat dilihat bahwa Jerman menandai perluasan energi panas bumi di daerah Aceh Indonesia. Setelah kebijakan pemerintah Jerman terkait transisi energi (German Energy Transition) pada tahun 2010 bertekad untuk beralih kepada energi terbarukan.²⁰ Penelitian lainnya yaitu Jürgen-Friedrich Hake, Wolfgang Fischer, Sandra Venghaus, Christoph Weckenbrock (2015). “The German Energiewende History and Status Quo” yang mengemukakan bahwa negara maju sangat bergantung kepada bahan bakar fosil sebagai penggerak ekonomi. Hal ini dikarenakan sistem energi memiliki peran khusus dalam mewujudkan visi di masa depan. Pemerintah Jerman telah menetapkan visi dalam pembangunan berkelanjutan dan sistem energi terbarukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengilustrasikan peran Jerman dalam mempromosikan sistem energi yang terutama didasarkan pada energi terbarukan dengan menunjukkan faktor pendorong yang secara berturut - turut mengarah pada transisi energi. Untuk menjelaskan dinamika ini, kemunculan sejarah kebijakan energi Jerman mengungkap ketergantungan (hubungan kekuasaan yang mendasari) saluran dan wacana, serta kekuatan eksternal yang memungkinkan perubahan signifikan dalam strategi kebijakan energi Jerman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangan kebijakan energi Jerman, dengan fokus khusus pada transisi energi dan kemunculannya pada periode yang berbeda dalam sejarah kebijakan energi. Seperti ditunjukkan di awal, analisis menegaskan bahwa asal usul transisi energi sudah ada sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Untuk memahami pendorong dan keadaan khusus yang mengarah pada kebijakan energi progresif di Jerman ini, kami secara sistematis memeriksa berbagai kekuatan politik, dinamika sosial, dan dinamika wacana dalam waktu dan urutan peristiwa dan keputusan.²¹

²⁰ Giandwinuary Geybi. Universitas Riau. *Kerjasama Indonesia Dan Jerman Dalam Pengembangan Energi Panas Bumi (Geothermal) 2010-2012 Di Indonesia*. Februari 2015. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/4863/4745>

²¹ Hake, J.-F., Fischer, W., Venghaus, S., & Weckenbrock, C. (2015). *The German Energiewende – History and status quo*. *Energy*, 92, 532–546. Institute of Energy and Climate Research

Berikut adalah tabel rangkuman kajian literatur terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan dalam mendalami kebijakan Jerman dalam penggunaan energi terbarukan sebagai langkah untuk melakukan transisi energi.

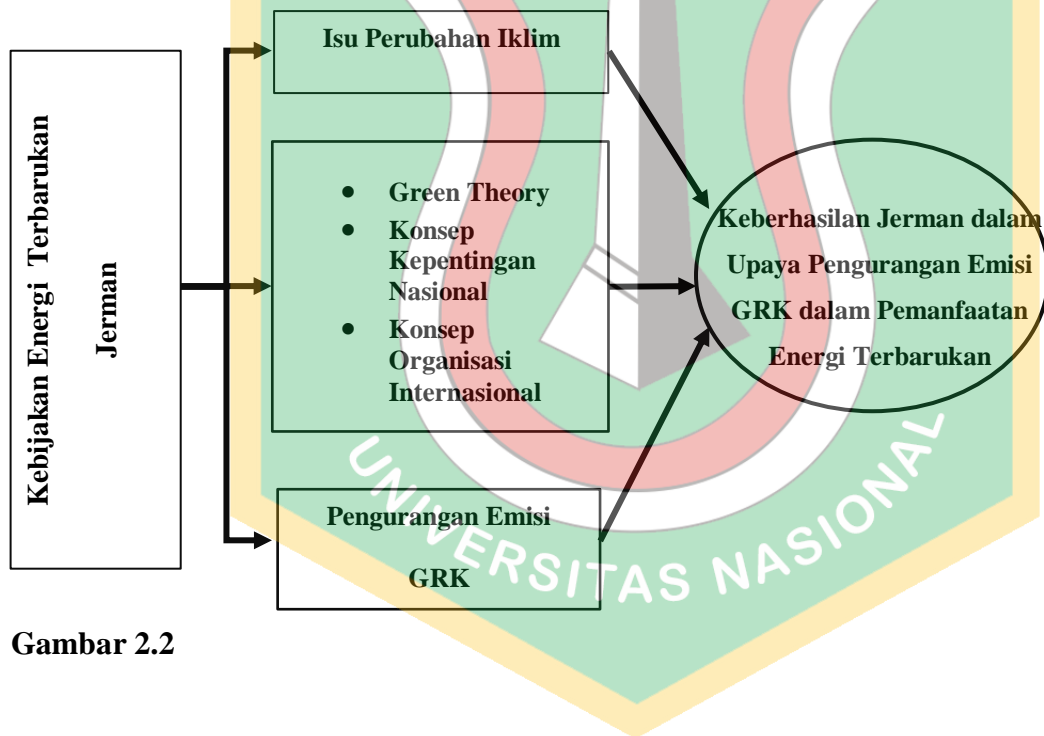
Peneliti	Judul Penelitian	Teori yang Digunakan	Perbedaan Fokus
Akbar Averroes Sabil	Kepentingan Jerman Dalam Kerjasama Weimar Triangle Terkait Energi Terbarukan Periode 2012 - 2015	Green Theory, Keamanan Energi Konsep Kepentingan Nasional	Kerjasama Internasional
Geybi Giandwinuary	Kerjasama Indonesia dan Jerman Dalam Pengembangan Energi Panas Bumi (Geothermal) 2010 - 2012	Teori Kerjasama Internasional	Potensi Kerjasama Indonesia dan Jerman, Penggunaan Geothermal (Energi Panas bumi) sebagai Energi alternatif
Urgen-Friedrich Hake, , Wolfgang Fischer, Sandra Venghaus Christoph Weckenbrock	The German Energiewende History and Status Quo”	Kepentingan Energi, Politik	Pengembangan politik Energi Jerman konstelasi kekuatan politik dinamika sosial dan dinamika wacana

Tabel 2.1

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh negara Jerman terkait dengan penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pergeseran paling dramatis dalam kebijakan energi telah terjadi sebagai tanggapan atas bencana nuklir, tetapi konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak diinginkan dari kebijakan batubara juga berdampak signifikan pada jalannya. Perdebatan iklim yang muncul mencegah industri batu bara untuk berfungsi sebagai alternatif dari penurunan pangsa pembangkit listrik tenaga nuklir. Jerman banyak berinvestasi dalam energi terbarukan sebagai bagian dari inisiatif Energy Wende pemerintah federal untuk beralih dari bahan bakar fosil dan nuklir ke pasokan energi rendah karbon, hijau, andal, dan terjangkau pada tahun 2050.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.2